

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.
Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Painan, 9 Desember 2020

Pihak Pertama

KEPALA DINAS SOSIAL PprPA
KAB. PESISIR SELATAN

dto

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB

Gambaran Umum Bidang Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, serta melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar, telah meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.

Permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara serius untuk menghindarkan kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Program dan Kegiatan.**Urusan : SOSIAL****SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN SOSIAL			
	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	380.406.889	378.602.335	98,96
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.840.000	36.394.685	96,18
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72.515.700	72.515.700	100,00
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	104.298.538	104.298.500	100,00
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.730.898	22.730.750	100,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.178.249	14.178.000	100,00
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.420	3.499.000	99,99
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan	4.500.000	4.320.000	96,00
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	12.600.000	12.600.000	100,00
	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85.444.084	85.265.700	99,79
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	22.800.000	22.800.000	100,00
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258.590.000	256.562.396	99,22
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-
	2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	8.300.000	8.300.000	99,22
	3 Pengadaan Mubiller kantor	22.000.000	22.000.000	100,00
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	41.210.000	41.210.000	100,00
	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	177.780.000	175.752.396	98,86
	6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.300.000	9.300.000	100,00
	3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	212.783.950	207.113.850	97,34
	1 Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	31.348.950	31.348.950	100,00
	2 Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	-	-	-

	3	Pelayanan Orang Terlantar	4.260.000	4.260.000	100,00
	4	Pengembangan Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	7.075.000	7.075.000	100,00
	5	Operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)	170.100.000	164.429.900	96,67
	4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	64.223.900	64.223.900	100,00
	1	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	47.490.850	47.490.850	100,00
	2	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	12.669.050	12.669.050	100,00
	3	Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan KUBE Fakir Miskin	4.064.000	4.064.000	100,00
	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	246.171.850	243.435.450	98,89
	1	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	246.171.850	243.435.450	98,89
	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	52.750.200	52.750.200	100,00
	1	Penguatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan	52.750.200	52.750.200	100,00
	7	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	12.544.100	12.544.100	100,00
	1	Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda	-	-	-
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan	12.544.100	12.544.100	100,00

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.227.470.889,- terealisasi sebesar Rp. 1.215.232.231,- atau 99,00 %
Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Penyediaan Makan Minum, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.)**

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan operasional administrasi perkantoran untuk memperlancar kegiatan dan pelayanan. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 380.406.889 realisasi sebesar Rp. 378.602.335,- atau 98,96%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Meubiler, Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana kantor agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 258.590.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 256.562.396,- (99,22%).

**3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan**

Kegiatan ini bertujuan menyediakan kebutuhan operasional penyaluran bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 31.348.950,- realisasi sebesar Rp. 31.348.950,- atau 100,00%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan dan terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap bantuan Program PKH di Pesisir Selatan.

Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penyaluran bantuan Program PKH yang tepat sasaran.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya penanggulangan orang terlantar, dan ODGJ, dengan anggaran sebesar Rp. 4.260.000,-, realisasi sebesar Rp.4.260.000,- atau 100,00 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tertanggulangnya orang terlantar dan ODGJ.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap orang terlantar dan ODGJ.

Kegiatan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini bertujuan untuk fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.075.000 ,- realisasi sebesar Rp. 7.075.000 ,-

atau sebesar 100,00 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya permasalahan fakir miskin. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

Kegiatan Operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)

Kegiatan ini bertujuan untuk operasional Kegiatan Penanganan Fakir Miskin (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19) dengan anggaran sebesar Rp. 170.100.000 ,- realisasi sebesar Rp. 164.429.900 ,- atau sebesar 96,67 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial serta penyediaan logistik bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 47.490.850,- dan realisasi sebesar Rp. 47.490.850,- (100 %).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya biaya penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pemberian bantuan berupa logistik. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penanganan tanggap darurat tentang kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan non tunai di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 12.669.050,- dan realisasi sebesar Rp. 12.669.050,- atau 100,00%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan pangan non tunai tepat sasaran. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin.

Kegiatan Pendampingan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, dengan anggaran sebesar Rp. 4.064.000,- realisasi sebesar Rp. 4.064.000,- atau sebesar 100,00 %. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.

Program ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan para penerima jaminan sosial penyandang cacat berat disetiap kecamatan serta menyediakan uang transportasi dan akomodasi para pendamping dalam rangka pertemuan di kabupaten serta pemberian bantuan alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan anggaran sebesar Rp 246.171.850,- dan realisasi sebesar Rp. 243.435.450,- atau 98,89 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya bantuan kursi roda dan keperluan penyandang cacat berat penerima jaminan sosial pusat. Dampak dari program ini adalah terbinanya para cacat berat.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) dengan anggaran sebesar Rp. 52.750.200,- terealisasi sebesar Rp. 52.750.200,- atau sekitar 100,00 %

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM pengelola LKKS dan terfasilitasinya operasional kegiatan LKKS Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari Program ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial di Pesisir Selatan.

7. Program Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan

Program ini bertujuan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Kecamatan Bayang dengan anggaran sebesar Rp. 12.544.100,- realisasi sebesar Rp. 12.544.100,- atau 100,00 %

Hasilnya adalah terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub. Dampaknya adalah terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan makam pahlawan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah akibat pandemi covid-19 keuangan difokuskan untuk penanganan covid-19 sehingga pekerjaan yang telah direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, selain itu, permasalahan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua kelompok masyarakat yang dapat dilayani mengingat keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat yang hampir setiap tahun mengalami bencana, maka perlu persiapan bantuan kepada korban bencana dan diperlukan perhatian dan penanganannya secara khusus.

Solusi atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah :

- Memperluas jangkauan pelayanan peningkatan kemampuan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- Meningkatkan potensi dan partisipasi PSKS.
- Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.

1. URUSAN WAJIB

A. Gambaran Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini coba diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender dan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
14	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	187.791.515	187.708.550	99,96
	1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	14.750.000	14.728.550	99,85
	2. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	22.837.315	22.775.800	99,73
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi	150.204.200	150.204.200	100,00
	2 PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	20.691.000	20.570.900	99,42
	1. Pembinaan Nagari Layak Anak	20.691.000	20.570.900	99,42

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi P2TP2A sebagai lembaga yang berfungsi melakukan advokasi dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.750.000,- realisasi sebesar Rp. 14.728.550,- atau 99,85%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.837.315,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.775.800,- Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya kelembagaan PUG pada setiap perangkat daerah. Dampak kegiatan ini adalah tercapainya pengarusutamaan gender pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kelembagaan Organisasi Wanita terdiri Gabungan Organisasi Wanita, Dharmawanita Persatuan dan Badan Kontak Majelis Taklim. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.204.200,- realisasi sebesar Rp. 150.204.200,- atau 100,00 %

Hasil dari program ini adalah meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam organisasi kewanitaan GOW, DWP dan BKMT.

Dampak program ini adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui fasilitasi kelembagaan organisasi perempuan.

2. Program Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan Nagari Layak Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan Fasilitasi Nagari Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.691.000,- realisasi sebesar Rp.20.570.900,- atau sekitar 99,42 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak anak melalui pembinaan Nagari Layak Anak. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dan tercapainya prediket Kabupaten Layak Anak.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program diatas adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang isu Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Resposif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tujuan program ini belum maksimal dicapai.

Sedangkan solusi yang diperlukan adalah perlunya komitmen pimpinan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai.

Painan, 22 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

